

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Banten.
- Dendy Sugono, dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Erni Tris Kurniawan, Sule, dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung.

- Imam Koeswahyono, 2012, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, UB Press, Malang.
- M. Manullang, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Praduji Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.F.Marbun dan Moh Mahfud. MD, 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

T. Hani Handoko, 2011, *Manajemen (Edisi 2)*, BPFE, Yogyakarta.

Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata
Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban
Bangunan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penataan Ruang.

Makalah

Philipus M. Hadjon, 1997, *Wewenang*, Makalah, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya

Jurnal

Baihaqi, *“Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan”*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2016.

Anni Puji Astutik, *“Akibat Hukum Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan DI Kabupaten Pamekasan”*, Jurnal YUSTISIA Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 18, Nomor 1, 1 Mei 2017.

Ahmad Jazuli, 2017, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 2.

LAMPIRAN

Surat Keterangan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Urip Sumaharjo No. 8, Makassar 90144
Telp. (0411) 435 550 Fax. (0411) 436 567 Email: distaru@makassarkota.go.id Web: distaru.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 047/2079 /Distaru/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Ir. H. MUH. FUAD AZIS DM., ST., M.Si
NIP : 19691019 200701 1 018
Pangkat / Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD IHZA IMANUDDIN B.MANAF
Nim / Jurusan : B021171522/ Hukum Administrasi Negara
Instansi / pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Hasnuddin Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PENATAAN RUANG
KOTA MAKASSAR DALAM MENGAWASI IMB YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA"

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar terhitung mulai tanggal 15 Agustus s/d 22 Agustus 2023

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Agustus 2023

Kepala Dinas
Sekretaris,

Dr. Ir. H. MUH. FUAD AZIS DM., ST., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19691019 200701 1 018

Distaru Kota Makassar



distaru_mks



distaru_mks

